



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menjalankan tugas sehari - hari, Amin.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah disusun dokumen Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja dimaksud adalah merupakan penjabaran dari RENSTRA Bappeda tahun 2017-2022 dan juga sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, serta diselaraskan dengan kegiatan strategis, prioritas baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPEDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2019.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, Juni 2018

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,

H U D A Y A
Pembina Utama Madya
NIP. 19580612 198503 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Banten	31
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Banten	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	63
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	63
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Banten.....	67
3.3. Program dan Kegiatan	70
BAB IV PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Apbd) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.....	8
Tabel. 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017	24
Tabel. 2.3. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.....	32
Tabel. 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten	33
Tabel. 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2017 Provinsi Banten.....	50
Tabel. 3.1. Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten	69
Tabel. 3.2. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019	73



\

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Kerja
-------------	---

2



BAB I

PENDAHULUAN

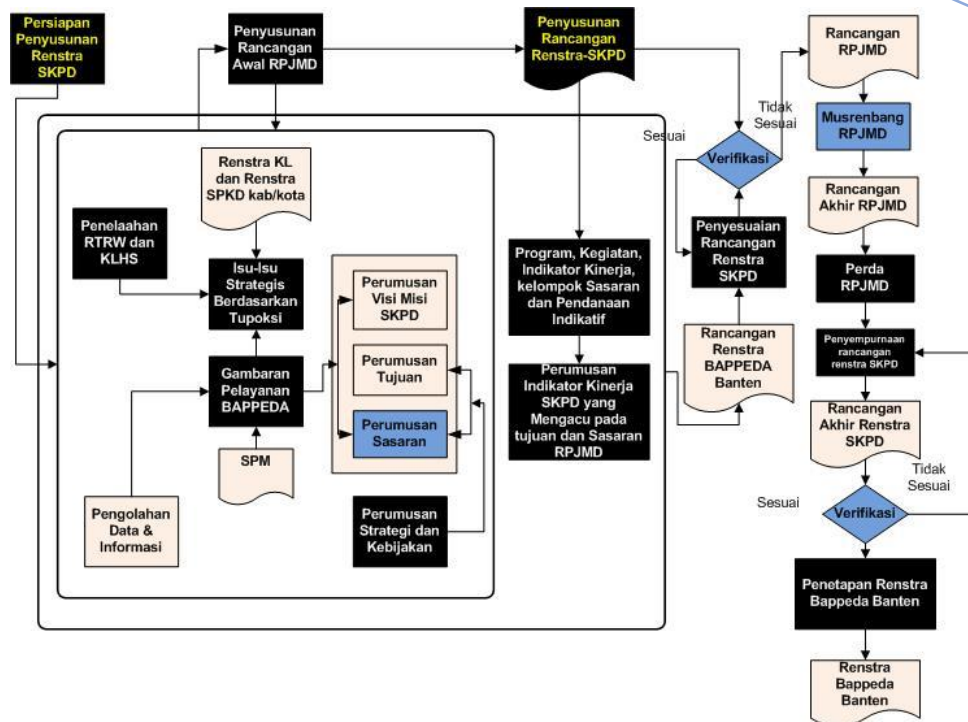
1.1. Latar Belakang

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berpedoman kepada Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah serta RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Rencana kerja Bappeda Provinsi Banten sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan, urusan Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda.

Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, selanjutnya Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Banten digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Anggaran (RKA) BAPPEDA Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Provinsi Banten Tahun 2019.



Alur Penyusunan Rencana Kerja Sesuai Dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan rencana pembangunan, sedangkan Tujuan penyusunan dokumen rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah dan pedoman rencana pelaksanaan kegiatan program pembangunan dilingkungan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 secara terarah dan terpadu, sesuai tugas pokok dan peran fungsi dalam rangka mengatasi permasalahan yang perlu ditangani.

Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Bab ini menyajikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menyajikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran renja SKPD, Program dan Kegiatan;

BAB IV PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang Catatan Penting, Kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

B_{ab} II

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018

2.1. Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2018 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Banten

Renja BAPPEDA Provinsi Banten pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Banten selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan indikator kinerja menjadi sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur keberhasilan/kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

B. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Pencapaian kinerja sasaran strategis Tahun 2018, telah selaras dengan target didalam Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Pada Tahun 2018 total anggaran Bappeda provinsi Provinsi Banten sebesar Rp. 62.154.400.000,00 dengan efisiensi/efektifitas dengan rincian Belanja Langsung sebesar Rp. 37.165.400.000 Dari jumlah dana tersebut terealisasi hingga bulan Juli sebesar Rp. 11.373.907.536 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 58,17%. Perhatikan tabel berikut:

Tabel. 2.1 Laporan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Apbd) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

URUSAN/BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/TOLOK UKUR KINERJA KEGIATAN		TARGET KINERJA DAN ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2018		REALISASI KINERJA PADA BULANAN TAHUN 2018 (BULAN JANUARI S.D DESEMBER)								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DIEVALUASI (TAHUN 2018)	
				REALISASI	TW-I		TW-II		TW-III		TW-IV		
		K	RP.			K(%)	RP.	K(%)	RP.	K(%)	RP.	K(%)	RP.
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang													
Perencanaan													
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah		100,00%											
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		100,00%	90.320.000		8,7	7.900.000	83,88	75.760.000				45.61	
	a. Penyusunan Dokumen laporan keuangan	12 Dokumen		a. Penyusunan Dokumen laporan keuangan	1.86 %	2.000.000	79,8	71.660.000				100%	
	b. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen		b. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	0.00 %	0	2,8	2.500.000				50%	
	c. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.	20 Dokumen		c. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.	1.25 %	1.350.000	1,8	1.600.000				1.25 %	
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100,00%	248.003.800		16,05	39.800.000	40.08	146.900.000				62.87	
	Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	5 Dokumen		Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	20.00 %	15.584.000	19,1	25.916.000				90%	
	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen		Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	25.00 %	162.990.000	33,2	77.135.000				78%	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5 Dokumen		Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	0.00 %	0	11,1	38.035.000					25%	
	Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen		Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	0.00 %	0	0,5	41.850.000					73%	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor		100,00%	1.281.290.000		0	0	20,06	257.086.000						
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan			Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0	0	0,00	0						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	0	0	0,00	0						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	0	0	2,22	27.600.000						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0	0,00	0						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0	0	10,77	127.642.000						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	0	0	0,00	0						
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	0	0	0,00	0						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	0	0	0,00	0					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0	0	6,24	78.084.000					
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF			Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF	0	0	0,00	23.760.000					
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Videotron			Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Videotron	0	0	0,00	0					
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		100,00%	2.836.809.500		3,6	101.863.275	41,2	1.167.693.610				74.25	
	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor	1 Paket		Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor			19,0	490.233.110					
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Paket		Pemeliharaan Kendaraan Dinas			21,3	586.985.500					
	Pemeliharaan Inventaris kantor/APK	1 Paket		Pemeliharaan Inventaris kantor/APK			3,5	90.475.000					
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		12 Bulan	7.756.620.500		14,09	1.093.075.285	33,7	2.616.210.827				39.81	
	Operasional Kantor Tidak Tetap	12 Bulan		Operasional Kantor Tidak Tetap			7,8	591.750.000					
	Penyediaan Barang Pakai Habis	12 Bulan		Penyediaan Barang Pakai Habis			3,3	244.331.950					
	Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan		Penyediaan Operasional Jasa Kantor			7,9	597.635.077					

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan		Penyediaan Bahan Cetak			1,5	109.910.000						
Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan		Penyediaan Makan dan Minum Kantor			9,7	742.843.000						
Penyediaan BBM	12 Bulan		Penyediaan BBM			4,3	329.740.800						
Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan		Penyediaan Promosi dan Publikasi			0,0	0						
Peningkatan Kapasitas Aparatur	93 Orang	475.000.000		3,59	17.075.000	10,31	48.951.400					43.56	
Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten	93 Orang		Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten			9,576842105	45.490.000						
Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten	93 Orang		Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten			0,728715789	3.461.400						
Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	5.116.407.000		7,95	406759645	60,0	1.502.707.933					58.92	
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	100,00%	39.859.000		4,5	1.784.600	53,3	21.254.600					56.00	
Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	25 Orang		Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten			53,3	21.254.600						
Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	1 Paket		Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten			0,0	0						
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100,00%												
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100,00%	4.024.479.600		14,7	591.560.000	48,6	1.114.835.000					51.14	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019			28,31	671.554.000						
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen		Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018			2,87	58.500.000						
Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019	1 Dokumen		Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019			0,86	-						
Penyusunan Data E-Musrenbangnas SKPD Provinsi Dan Kab/Kota TA. 2019	1 Dokumen		Penyusunan Data E-Musrenbangnas SKPD Provinsi Dan Kab/Kota TA. 2019			1,37	48.360.000						
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Dokumen		Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019			0,00	-						
Penyusunan APBD PerubahanTA. 2018	1 Dokumen		Penyusunan APBD PerubahanTA. 2018			0,00	-						
Sosialisasi Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Banten	1 Dokumen		Sosialisasi Pelaksanaan Forum OPD Provinsi Banten			1,92	35.345.000						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

	Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten	1 Dokumen		Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten			1,02	15.421.000						
	Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten	1 Dokumen		Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten			0,00	-						
	Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan (SIMRAL)	1 Dokumen		Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan (SIMRAL)			2,84	7.860.000						
	Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022	1 Dokumen		Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022			0,00	-						
	Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019	1 Dokumen		Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019			9,45	277.795.000						
	Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten	1 Dokumen		Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten			0,00	-						
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		100,00%	1.833.005.000		5,8	106.960.000	31,7	429.280.000					51.55	
	Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	17 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan			9,88	57.550.000						
	Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017	1 Dokumen		Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017			6,22	94.820.000						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Tersusunnya Dokumen PERKIN d.an IKU Provinsi Banten Tahun 2018	2 Dokumen		Tersusunnya Dokumen PERKIN d.an IKU Provinsi Banten Tahun 2018			4,20	76.280.000						
Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi			2,96	42.330.000						
Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten	1 Software		Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten			5,34	107.800.000						
Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota			0,39	-						
Tersusunnya Dokumen Sistem Pengendalian Evaluasi RPJMD Tahun 2017-2022	1 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Sistem Pengendalian Evaluasi RPJMD Tahun 2017-2022			0,00	-						
Tersusunnya Dokumen Evaluasi RKPD Kab./Kota	8 Dokumen		Tersusunnya Dokumen Evaluasi RKPD Kab./Kota			2,73	50.500.000						
Kerjasama Pembangunan Daerah	100,00%	143.615.000		0	0	23,22	33.345.000					63.33	
Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah	1 Dokumen		Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah			0	0						
Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD	1 Dokumen		Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD			23,2	33.345.000						
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	100,00%	425.230.000		3,54	15.056.000	46,2	196.478.000					63.53	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	15 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan			44,3	188.478.000						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4 Dokumen		Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan			2,0	8.000.000						
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	100,00%	524.000.000		0	0	26,1221374	136.880.000					66.36	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	18 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif			24,7	129.540.000						
Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen		Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif			1,4	7.340.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	100,00%	547.545.000		3,81	37	15.94	201.465.000					74.26	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	8 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan			30,1	123.830.000						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4 Dokumen		Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan			3,5	18.500.000						
Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan	3 Dokumen		Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan			6,5	34.635.000						
Pengendalian dan Perkembangan KPI	3 Dokumen		Pengendalian dan Perkembangan KPI			4,5	24.500.000						
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	100,00%	350.200.000		6,18	21.650.000	65,8	230.500.000					74,61	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial	11 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial			62,3	218.300.000						
Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen		Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial			3,5	12.200.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	100,00%	428.100.000		5,82	24.900.000	25,7	43.300.000					74,27	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	5 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan			21,7	34.650.000						
Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017	1 Dokumen		Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017			4,0	8.650.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	100,00%	401.385.000		4,6	18.370.000	38,8853594	156.080.000					54.79	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	11 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan			27,2	102.820.000						
Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	12 Dokumen		Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan			2,2	8.870.000						
Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 Kegiatan		Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal			11,2	44.390.000						
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	100,00%	2.612.840.400		5,02	131.058.000	13.36	80.250.000					31.91	
Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	2 Dokumen		Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan			0,7	10.500.000						
Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen		Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan			7,5	408.705.500						

Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)	2 Dokumen		Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)			1,1	40.000.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	100,00%	473.005.000		17,43	82.444.000	56,5348358	250.865.000					71.92	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah	4 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah			53,1	234.732.000						
Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	1 Dokumen		Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah			3,4	16.133.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	100,00%	293.475.000		5,92	17.360.000	59.92	169.105.000					91.94	
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	7 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang			0	0						
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen		Pengendalian Pemanfaatan Ruang			66,52233917	169.105.000						
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	100,00%	360.359.000		9,9	35.610.000	20,2	72.890.000					13.42	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika			20,2	72.890.000						
Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen		Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika			0,0	0						
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang													
Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK Total	100,00%												
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	100,00%	4.960.033.200		6,15	304.890.000	41,7	1.328.450.000					50.83	
Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen		Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018			1,0	34.650.000						
Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018	1 Dokumen		Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018			0,0	0						
Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018	1 Dokumen		Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018			0,0	0						
Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018	1 Dokumen		Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018			0,0	0						
Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	1 Dokumen		Penyelenggaraan Penelitian Mandiri			0,0	0						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten	1 Dokumen		Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten			4,7	231.570.000						
Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten	3 Dokumen		Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten			3,7	181.520.000						
Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten			3,5	173.870.000						
Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten	1 Dokumen		Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten			3,7	182.970.000						
Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten	1 Dokumen		Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten			0,0	0						
Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota			0,0	0						

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

	Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan Kemaritiman di Provinsi Banten	1 Dokumen		Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan Kemaritiman di Provinsi Banten			0,0	0					
	Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten	1 Dokumen		Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten			4,9	0					
	Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten	1 Dokumen		Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten			4,9	0					
	Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018	1 Dokumen		Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018			15,1	523.870.000					
Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah		100,00%	1.123.318.000		2,83	31.755.000	16,9	191.345.000				57.00	
	Pengembangan Teknologi	5 Dokumen		Pengembangan Teknologi			7,8	87.625.000					
	Pengembangan Inovasi	6 Dokumen		Pengembangan Inovasi			9,1	102.220.000					
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
Statistik													
Penyediaan Data Pembangunan Daerah		100,00%											

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		100,00%	820.500.000		7,8	63.768.000	34,0	278.584.667					52.74	
	<i>Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten</i>	1 Dokumen		Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten			0,3	2.650.000						
	<i>Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten</i>	1 Dokumen		Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten			5,9	48.066.667						
	<i>Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten</i>	1 Tahun		Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten			4,4	36.258.000						
	<i>Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten</i>	2 Dokumen		Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten			4,5	37.000.000						
	<i>Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten</i>	1 Dokumen		Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten			0,0	300.000						
	<i>Forum Data Pembangunan Provinsi Banten</i>	1 Dokumen		Forum Data Pembangunan Provinsi Banten			6,1	49.500.000						
	<i>publikasi</i>	3 Dokumen		publikasi			12,8	104.810.000						
JUMLAH			37.165.400.000		4,51	3.295.562.842	13,70	20.411.217.640					72.96	

Pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Banten

Pengukuran kinerja kegiatan adalah pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja masing - masing kegiatan yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome*, serta telah sampai sejauhmana tingkat capainya dari rencana yang telah ditetapkan, dan realisasi capaian indikator kinerja input telah diuraikan sebagaimana diatas.

Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja dari out put dan out comes kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pada tingkat out put capaian kinerjanya sampai dengan bulan Maret secara keseluruhan rata-rata mencapai sebesar 26.39 % dengan penilaian capaian dari pengukuran kinerja tersebut adalah Kondisi dari realisasi capaian kinerja output dan outcome kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, dan selanjutnya realisasi capaian menurut dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II bulan Juni 2019 adalah sebagai mana dijelaskan pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun (n-2) 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2) 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3003.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM	2,8 Skala	2.5	2.5 Skala	2.5 Skala	100	2,8		
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22 Dokumen	110	22 Dokumen	22 Dokumen	100	22		
		1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17 Dokumen	85	17 Dokumen	17 Dokumen	100	17		
		2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
3003.15	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan,	16 Dokumen	81	17 Dokumen	17 Dokumen	100	16		
		1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
		2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9 Dokumen	45	9 Dokumen	9 Dokumen	100	9		
		3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		

		4 Penyusunan Renstra	0 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0		
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	1 Dokumen	5	1 Paket	1 Paket	100	1		
		1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Dokumen	5	1 Paket	1 Paket	100	1		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		1 Operasional kantor Tidak tetap	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		7 Penyediaan BBM	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	93 Orang	93	93 orang	93 orang	100	93		
		1 Peningkatan Kompetensi Aparatur	93 Orang	93	93 orang	93 orang	100	93		
		2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	0 Orang	15	15 orang	15 orang	100	0		
	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Bulan	60	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12 Bulan	60	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		

		1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
		2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12		
	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	50%	90	30%	30%	100	50		
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi Banten	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	100%	100	100%	100%	100	100		
		2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	100%	100	100%	100%	100	100		
		3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD	80%	100	70%	70%	100	80		
		4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	70%	85	50%	50%	100	70		
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	13 Dokumen	66	14 Dokumen	14 Dokumen	100	13		
		1 Penyusunan APBD	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
		2 Penyusunan APBD Perubahan	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
		3 Penyusunan RPJMD	0 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0		
		4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		7 Pedoman Penyusunan RKA	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		

		8 Penyusunan Perencanaan APBN	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	24 Dokumen	109	20 Dokumen	20 Dokumen	100	24		
		1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	8	0 Dokumen	0 Dokumen	100	4		
		3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	8 Dokumen	40	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8		
		4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran	1 Dokumen	6	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		5 Penyusunan PERKIN dan IKU	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
		6 Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Kerjasama Pendanaan Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan	3 Dokumen	15	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3		
		1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
3003.16	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	70%	90	50%	50%	100	70		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	10 Dokumen	50	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10		

		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup SubidDunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
3003.17	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	70%	90	50%	50%	100	70		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	8 Dokumen	40	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8		

		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	12 Dokumen	60	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12		
		1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
3003.18	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	70%	90	50%	50%	100	70		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		

		1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
3007.15	Program Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	50%	80	30%	30%	100	50		
		2 Persentase inovasi yang diadopsi	50%	100	30%	30%	100	50		
	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan	14 Dokumen	70	16 Dokumen	16 Dokumen	100	14		
		1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	6 Dokumen	30	6 Dokumen	6 Dokumen	100	6		
		Kelitbangan2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	8 Dokumen	40	8 Dokumen	8 Dokumen	100	8		
		3 Penyusunan Jurnal	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
		4 Koordinasi KELITBANGAN	1 Dokumen	5	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1		
	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	4 Dokumen	20	4 Dokumen	4 Dokumen	100	4		
		1 Pengembangan Inovasi	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		
		2 Pengembangan Teknologi	2 Dokumen	10	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Mengacu pada landasan pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas bahwa tugas Kementerian PPN/Bappenas memiliki 4 (empat) peran, sebagai: 1). pengambil kebijakan/keputusan (*policy/decision maker*); 2). koordinator; 3). *think-tank*; dan 4). administrator. Maka Bappeda Provinsi Banten menjabarkan keempat peran tersebut ke dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya pada berbagai kegiatan strategis.

Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan (*policy/decision maker*)**, Bappeda Provinsi Banten menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk RKPD yang bersifat tahunan, disusun berikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk RPJMD dimulai sejak RPJMD 2017-2022. Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda Provinsi Banten juga berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai **koordinator**, Bappeda Provinsi Banten antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun dan tugas-tugas lainnya. Diantaranya adalah koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), koordinasi penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain, koordinasi/fasilitasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.

Sebagai ***think tank***, Bappeda Provinsi Banten melakukan analisis/telaahan kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan

kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Kemudian, kegiatan sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pusat, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi, serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.3
Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten

<i>PENGAMBIL KEPUTUSAN (POLICY/DECISION MAKER)</i>	<i>THINK TANK</i>	<i>KOORDINATOR</i>	<i>ADMINISTRATOR</i>
PENJABARAN:	PENJABARAN:	PENJABARAN:	PENJABARAN:
1. Perencanaan: penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek/tahunan. 2. Penganggaran: penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD. 3. Pengendalian dan Evaluasi: terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Analisis kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan lainnya.	1. Koordinasi dalam perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. 2. Koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 3. Koordinasi kegiatan strategis penanganan permasalahan mendesak sesuai penugasan.	1. Pengelolaan dokumen perencanaan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 2. Pengelolaan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 3. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI		TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Data Capaian Pada Tahun 2017	Target Renstra Bappeda					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2018	2019	2020	2021	2022					
						Target	Target	Target	Target	Target	2017	2018	2017	2018	
Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Nilai IKM				2.5 Skala	2,8	3	3,2	3,4	3,6	2.5	2.5	2.5	2.5	
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				22 Dokumen	22	22	22	22	22	110	110	110	110	
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan				17 Dokumen	17	17	17	17	17	85	85	85	85	
	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15	
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan,				17 Dokumen	16	16	16	16	17	81	81	81	81	
	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15	
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan				9 Dokumen	9	9	9	9	9	45	45	45	45	
	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	4 Penyusunan Renstra				1 Dokumen	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket				1 Paket	1	1	1	1	1	5	5	5	5	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor				1 Paket	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	1 Operasional kantor Tidak tetap				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	2 Penyediaan Barang Habis Pakai				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	3 Penyediaan Bahan Cetak				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	5 Penyediaan Promosi dan Publikasi				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	7 Penyediaan BBM				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Peningkatan Kapasitas Aparatur	0 Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang				93 orang	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
	1 Peningkatan Kompetensi Aparatur				93 orang	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
	2 Fasilitas Administrasi Kepegawaian				15 orang	0	15	15	15	15	15	15	15	15	
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	0 Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

	1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				12 Bulan	12	12	12	12	12	60	60	60	60	
	2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah				12 Bulan	12	12	12	12	12	60	60	60	60	
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten				12 Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi				30%	50	60	70	80	90	90	90	90	90	
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi Banten				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA				100%	100	0	0	0	0	100	100	100	100	
	2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD				70%	80	85	90	95	100	100	100	100	100	

	4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan				50%	70	75	75	80	85	85	85	85	100	
	dengan RTRW														
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan				14 Dokumen	13	13	13	13	13	66	66	66	66	
	Penganggaran											0		0	
	1 Penyusunan APBD				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15	
	2 Penyusunan APBD Perubahan				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15	
	3 Penyusunan RPJMD				1 Dokumen	0	0	0	0	1	1	1	1	1	
	4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	Kepada Kab/Kota														
	7 Pedoman Penyusunan RKA				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	8 Penyusunan Perencanaan APBN				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				20 Dokumen	24	20	20	24	21	109	109	109	109,00	
	1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	

	2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota				0 Dokumen	4	0	0	4	0	8	8	8	8	
	3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan				8 Dokumen	8	8	8	8	8	40	40	40	40	
	4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran				1 Dokumen	1	1	1	1	2	6	6	6	6	
	5 Penyusunan PERKIN dan IKU				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15	
	6 Pengendalian dan Evaluasi				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Kerjasama Pendanaan Pembangunan	0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan				3 Dokumen	3	3	3	3	3	15	15	15	15,00	
	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				50%	70	75	80	85	90	90	90	90	90	

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan				10 Dokumen	10	10	10	10	10	50	50,00	50	50,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20		20	20	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Usaha dan Ekonomi Kreatif	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Usaha dan Ekonomi Kreatif				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	

	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				50%	70	75	80	85	90	90	90	90	90	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	20	10	10	
	2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	

	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan				8 Dokumen	8	8	8	8	8	40	40,00	40	40,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan				12 Dokumen	12	12	12	12	12	60	60,00	60	60	
	1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
	3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	

Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan				50%	70	75	80	85	90	90	90	90	90	
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30	30	30,00	
	Mineral													10	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10		
	2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20		20		
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	

Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30,00	30	30,00	
	Informatika														
	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20	20	20	
Program Penelitian dan Pengembangan	1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan				30%	50	60	75	80	80	80	80	80	80	
	2 Persentase inovasi yang diadopsi				30%	50	60	75	80	100	100	100	100	100	
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan				16 Dokumen	14	14	14	14	14	70	70,00	70	70,00	
	1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah				6 Dokumen	6	6	6	6	6	30	30	30	30	
	Kelitbangan2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri				8 Dokumen	8	8	8	8	8	40	40	40	40	
	3 Penyusunan Jurnal				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	
	4 Koordinasi Kelitbangan				1 Dokumen	1	1	1	1	1	5	5	5	5	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah				4 Dokumen	4	4	4	4	4	20	20,00	20	20,00	
	1 Pengembangan Inovasi				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	
	2 Pengembangan Teknologi				2 Dokumen	2	2	2	2	2	10	10	10	10	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda Provinsi Banten dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan Bappeda Provinsi Banten;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra BAPPEDA telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga BAPPEDA harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.

2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas ;

Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappenas, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;

- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan nasional dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappenas, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (i.e Trilateral Desk);
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Kualitas SDM yang memadai;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappeda Provinsi Banten, Bappeda Kabupaten/Kota;

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Kabupaten/Kota, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Provinsi Banten antara lain:

- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappeda Kabupaten/Kota dan Bappeda Provinsi Banten;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra Perangkat Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan selaku fungsi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan;

- Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;
- Belum optimalnya system pengendalian intern;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Akan ditingkatkan kembali kerjasama antara BAPPEDA dengan Badan Pusat Statistik (BPS) didalam penyediaan data dan informasi statistik;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep bottom up planning (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda dan Trilateral Desk yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;
- Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
- Akan ditingkatkan kerjasama antara Bappeda Provinsi Banten dengan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan penelitian dan pengembangan.
- Adanya Dokumen Rencana Tata Ruang yang dapat dijadikan baseline perencanaan kajian-kajian lain;
- Sudah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sub bidang sebagai bentuk mekanisme telaah substansi perencanaan

tiap tahun dan menjadi dasar didalam merumuskan rencana pembangunan sektoral;

- Adanya lembaga ad hoc BKPRD;
- Sudah diintegrasikannya proses perencanaan dan penganggaran melaui aplikasi SIMRAL dan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah;
- Sudah terdapat instrument penilaian kinerja ASN;
- Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi PNS;
- Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja;
- Sudah disusun Dewan Riset Daerah Provinsi Banten yang dapat dijadikan komponen pendukung untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan di Provinsi Banten.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappeda Provinsi Banten;

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda Provinsi Banten;

Saran dan tindaklanjut dari hasil penyusunan KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten adalah :

- 1) Pemerintah Provinsi Banten harus menyediakan program updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;
- 2) Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;
- 3) Perlunya penguatan kapasitas Pemerintah Provinsi Banten dan universitas/ perguruan tinggi yang ada di Provinsi Banten untuk

melakukan analisis baseline dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

- 4) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib mengawal proses pengintegrasian hasil KLHS ke dalam hasil akhir Revisi RTRW Provinsi Banten;
- 5) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten;
- 6) Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Revisi RTRW Provinsi Banten untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS dibiayai;
- 7) Setelah Pokja Pengendalian Lingkungan habis masa tugasnya pada saat di-PERDA-kannya Revisi RTRW Provinsi Banten 2010-2030 monitoring pelaksanaan hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam Revisi RTRW Provinsi Banten akan dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup;
- 8) Monitoring dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada saat setiap penyusunan dokumen RKPD untuk memastikan integrasi KLHS dilaksanakan dan dibiayai.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan

penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappeda Provinsi Banten yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, pada tahun 2018 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 3 (tiga) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh tiga) Kegiatan, pagu anggaran sebesar Rp. 36.000.000.000,00 sedangkan pada tahun 2019 kebutuhan anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,00 dikarenakan untuk memenuhi kegiatan perencanaan strategis yang dilaksanakan pada tahun 2019, dijelaskan pada tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2018
Provinsi Banten

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	Program Tata Kelola Pemerintahan		1 Nilai IKM	3		Program Tata Kelola Pemerintahan		1 Nilai IKM	3		
	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22	90.320.000	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		0 Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22	90.320.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17			Provinsi Banten	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2			Provinsi Banten	2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2		
		Provinsi Banten	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3			Provinsi Banten	3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3		
	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan,	16	248.003.800	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		0 Tersusunnya Dokumen Perencanaan,	16	248.003.800	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

		Provinsi Banten	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3			Provinsi Banten	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan	3		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9			Provinsi Banten	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9		
		Provinsi Banten	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4			Provinsi Banten	3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	4		
		Provinsi Banten	4 Penyusunan Renstra	0			Provinsi Banten	4 Penyusunan Renstra	0		
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	1	1.281.290.000	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		0 Tersedianya Sarana Prasarana Kantor, Satuan : paket	1	1.281.290.000	
		Provinsi Banten	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1			Provinsi Banten	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1		
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	12	2.836.809.500	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		0 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor, Satuan : bulan	12	2.836.809.500	
		Provinsi Banten	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12			Provinsi Banten	1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	12		
		Provinsi Banten	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12			Provinsi Banten	2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12		
	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	12	7.756.620.500	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		0 Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran, Satuan : Bulan	12	7.756.620.500	
		Provinsi Banten	1 Operasional kantor Tidak tetap	12			Provinsi Banten	1 Operasional kantor Tidak tetap	12		

		Provinsi Banten	2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12			Provinsi Banten	2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12		
		Provinsi Banten	3 Penyediaan Bahan Cetak	12			Provinsi Banten	3 Penyediaan Bahan Cetak	12		
		Provinsi Banten	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12			Provinsi Banten	4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12		
		Provinsi Banten	5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12			Provinsi Banten	5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	12		
		Provinsi Banten	6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12			Provinsi Banten	6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12		
		Provinsi Banten	7 Penyediaan BBM	12			Provinsi Banten	7 Penyediaan BBM	12		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur		0 Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	93	475.000.000	Peningkatan Kapasitas Aparatur		0 Meningkatkan Kapasitas Aparatur, Satuan : Orang	93	475.000.000	
		Provinsi Banten	1 Peningkatan Kompetensi Aparatur	93			Provinsi Banten	1 Peningkatan Kompetensi Aparatur	93		
		Provinsi Banten	2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15			Provinsi Banten	2 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15		
	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	12	5.116.407.000	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah, Satuan : Bulan	12	5.116.407.000	
		Provinsi Banten	1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12			Provinsi Banten	1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12		
		Provinsi Banten	2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12			Provinsi Banten	2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12		

	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)	12	39.859.000	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan (bulan)	12	39.859.000	
		Provinsi Banten	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12			Provinsi Banten	1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten	12		
		Provinsi Banten	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12			Provinsi Banten	2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten	12		
2	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Provinsi Banten	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	60	820.500.000	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Provinsi Banten	1 Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	60	820.500.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan	4		Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		0 Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan	4		
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Banten	2		
		Provinsi Banten	2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi Banten	2			Provinsi Banten	2 Analisis Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi Banten	2		
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Provinsi Banten	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	0		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Provinsi Banten	1 Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	0		
		Provinsi Banten	2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan	100			Provinsi Banten	2 Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan	100		

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

		Provinsi Banten	PERKADA 3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD	85			Provinsi Banten	PERKADA 3 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD	85		
		Provinsi Banten	4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75			Provinsi Banten	4 Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	75		
	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	13	4.024.479.600	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	13	4.024.479.600	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan APBD	3			Provinsi Banten	1 Penyusunan APBD	3		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan APBD Perubahan	3			Provinsi Banten	2 Penyusunan APBD Perubahan	3		
		Provinsi Banten	3 Penyusunan RPJMD	0			Provinsi Banten	3 Penyusunan RPJMD	0		
		Provinsi Banten	4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	1			Provinsi Banten	4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten	1		
		Provinsi Banten	5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten	1			Provinsi Banten	5 Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten	1		
		Provinsi Banten	6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1			Provinsi Banten	6 Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota	1		
		Provinsi Banten	7 Pedoman Penyusunan RKA	2			Provinsi Banten	7 Pedoman Penyusunan RKA	2		
		Provinsi Banten	8 Penyusunan Perencanaan APBN	1			Provinsi Banten	8 Penyusunan Perencanaan APBN	1		
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	20	1.833.005.000	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		0 Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	20	1.833.005.000	

		Provinsi Banten	Pembangunan 1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota	4			Provinsi Banten	Pembangunan 1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kab/Kota	4		
		Provinsi Banten	2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	0			Provinsi Banten	2 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	0		
		Provinsi Banten	3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	8			Provinsi Banten	3 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan	8		
		Provinsi Banten	4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran	1			Provinsi Banten	4 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran	1		
		Provinsi Banten	5 Penyusunan PERKIN dan IKU	3			Provinsi Banten	5 Penyusunan PERKIN dan IKU	3		
		Provinsi Banten	6 Pengendalian dan Evaluasi	4			Provinsi Banten	6 Pengendalian dan Evaluasi	4		
	Kerjasama Pendanaan Pembangunan		0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan	3	143.615.000	Kerjasama Pendanaan Pembangunan		0 Tersusunnya Dokumen Kerjasama Pendanaan Pembangunan	3	143.615.000	
		Provinsi Banten	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	1			Provinsi Banten	1 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan CSR	1		
		Provinsi Banten	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	1			Provinsi Banten	2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan KPBU	1		
		Provinsi Banten	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor	1			Provinsi Banten	3 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Donor	1		
4	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi		1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi		1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang	6	425.230.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang	6	425.230.000	

			Ketahanan Pangan					Ketahanan Pangan			
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	10	547.545.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	10	547.545.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan	4		
		Provinsi Banten	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian	4			Provinsi Banten	3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan	6	524.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan	6	524.000.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	2		

			Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif					Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif			
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif	4		
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan		1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75			Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan	6	350.200.000		Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan	6	350.200.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan	2		
		Provinsi Banten	2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4			Provinsi Banten	2 Rapat Penyusunan Dokumen (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	6	428.100.000		Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	6	428.100.000	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	8	401.385.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan	8	401.385.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan	4		
		Provinsi Banten	3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar	2			Provinsi Banten	3 Perencanaan Pembangunan Kerjasama Antar	2		
	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	12	#####	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan	12	2.612.840.400	
		Provinsi	1 Koordinasi	4			Provinsi	1 Koordinasi	4		

		Banten	Program - Program Penanggulangan Kemiskinan				Banten	Program - Program Penanggulangan Kemiskinan			
		Provinsi Banten	2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan	4			Provinsi Banten	2 Pengendalian Program- Program Penanggulangan Kemiskinan	4		
		Provinsi Banten	3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)	4			Provinsi Banten	3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs)	4		
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		1 Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	75		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	6	293.475.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	6	293.475.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang	2		
		Provinsi Banten	2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4			Provinsi Banten	2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	6	473.005.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan	6	473.005.000	

	Infrastruktur Wilayah		Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah			Infrastruktur Wilayah		Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah			
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur	4		
	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	6	360.359.000	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika		0 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika	6	360.359.000	
		Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	2			Provinsi Banten	1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika	2		
		Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	4			Provinsi Banten	2 Penyusunan Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika	4		
7	Program Penelitian dan Pengembangan		1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	60		Program Penelitian dan Pengembangan		1 Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan	60		
			2 Persentase inovasi yang diadopsi	60				2 Persentase inovasi yang diadopsi	60		
	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah		0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan	14	4.960.033.200	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah		0 Tersedianya Dokumen Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan	14	4.960.033.200	

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten

[2019]

		Provinsi Banten	1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	6			Provinsi Banten	1 Penyusunan dokumen penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategis Daerah	6		
		Provinsi Banten	2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	8			Provinsi Banten	2 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri	8		
		Provinsi Banten	3 Penyusunan Jurnal	1			Provinsi Banten	3 Penyusunan Jurnal	1		
		Provinsi Banten	4 Koordinasi Kelitbangan	1			Provinsi Banten	4 Koordinasi Kelitbangan	1		
	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah		0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	4	1.123.318.000	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah		0 Tersedianya Dokumen Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah	4	1.123.318.000	
		Provinsi Banten	1 Pengembangan Inovasi	2			Provinsi Banten	1 Pengembangan Inovasi	2		
		Provinsi Banten	2 Pengembangan Teknologi	2			Provinsi Banten	2 Pengembangan Teknologi	2		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2019 memuat arah kebijakan sebagai berikut.

a. Arah Kebijakan Revolusi Mental :

Reformasi Birokrasi Pemerintah

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif)
2. Program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif.
3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi

Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik

1. Penegakan hukum, kode etik dan disiplin aparat pemerintah, penegakan hukum dan masyarakat
2. Harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundang – undangan untuk mendorong kreativitas masyarakat
3. Penanganan perkara secara transparan dan memuaskan
4. Pendidikan dan penghormatan etika dalam berpolitik

Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa

1. Pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur dan kerja keras)
2. Lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (bullying – free environment)
3. Pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi)

4. Peningkatan jiwa patriot, suka menolong dan cinta tanah air

Penguatan Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

1. Pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian
2. Peningkatan kerjasama dan kesetiakawan sosial
3. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga, media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Bangsa

1. Peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan
2. Penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri
3. Internalisasi nilai – nilai persaingan usaha yang sehat (cooperate and compete, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

b. Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan :

1. Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
3. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

c. Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan :

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dasar, serta memperluas dan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui perkuatan penjaminan mutu pendidika, pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan zaman, serta perkuatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel

3. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan dan penempatan guru yang merata
4. Revitalisasi LPTK untuk meningkatkan mutu pendidikan keguruan
5. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan layanan pendidikan anak usia dini
6. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja
7. Meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi, dan
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan

d. Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman :

1. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan
2. Peningkatan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas, serta penyelesaian rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh
3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, penerapan manajemen layanan terpadu, serta peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat
4. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air

e. Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental :

1. Peningkatan produksi padi dan pangan lain, terutama produktivitas, diversifikasi dan efisiensi rantai pasokan pangan
2. Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat
3. Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, terutama kecukupan nutrisi bagi masyarakat miskin dan keseimbangan gizi bagi masyarakat
4. Penanganan gangguan terhadap produksi pangan

f. Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan :

1. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim
2. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut
3. Penataan ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari
4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam
5. Penanggulangan dan penyelesaian illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing dan keamanan laut
6. Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau - pulau kecil

g. Arah Kebijakan Pembangunan Kedaulatan Energi :

1. Meningkatkan produksi energi primer
2. Meningkatkan cadangan energi
3. Meningkatkan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi
4. Meningkatkan aksesibilitas energi
5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi

h. Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata :

1. Pemasaran pariwisata nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara
2. Pembangunan destinasi pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri
3. Pembangunan industri pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran
4. Pembangunan kelembagaan pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional

i. Arah Kebijakan Pertumbuhan Industri :

1. Pengembangan perwilayahan industri di luar pulau jawa
2. Penumbuhan populasi industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha besar dan sedang dan 20 ribu usaha kecil
3. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri nasional (peningkatan nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar jawa :

1. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA
2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur
3. Pengembangan SDM dan IPTEK
4. Pengembangan regulasi dan kebijakan
5. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha antara lain : pelayanan terpadu satu atap (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

j. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi :

1. Penciptaan birokrasi efektif dan efisien

2. Penciptaan birokrasi yang melayani
3. Penciptaan birokrasi bersih dan akuntabel

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Banten

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran;
3. Membangun dan meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal;
4. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Misi Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang diukur dari capaian anugerah pangripta nusantara;

-
2. Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah yang diukur dari Capaian LAKIP Provinsi Banten;
 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan, Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diukur dari :
 - prosentase hasil Penelitian dan pengembangannya yang dimanfaatkan;
 - presentase inovasi yang diadopsi;
 - Presentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
 4. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang diukur dari meningkatnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

No.	TUJUAN	SASARAN	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Tahun 2017	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Akhir
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Capaian anugerah pang ripta nusantara (peringkat)	60	65	70	75	80	80	80
2	Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran	Meningkatnya Kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Capaian LAKIP (Nilai)	60	70	75	85	88	90	90
3	Membangun dan meningkatkan kualitas Penelitian dan Pengembangan, data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara optimal	Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan, Terbangunnya sistem jaringan data dan informasi, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1. prosentase hasil Penelitian dan pengembangannya yang dimanfaatkan (%)	0	50	60	65	70	80	80
			2. presentase inovasi yang diadopsi (%)	0	50	60	70	80	100	100
			3. Presentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (%)	30	50	60	70	80	90	90
4	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (nilai)	0	2,8	3,00	3,20	3,40	3,60	3,60

3.3. Program dan Kegiatan

Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek Pembangunan Daerah 2017-2022 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2017-2022.

Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2017-2022, pada tahun 2019 Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 3 (empat) Bidang Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 25 (dua puluh tiga) Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2019.

Adapun program yang diarahkan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
2. Program Tata Kelola Pemerintahan
3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
4. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
5. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan Kemasyarakatan
6. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
7. Program Penelitian Dan Pengembangan

Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah
 - a. Capaian Program : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
2. Program Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
 - b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah (100%)

- c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
- d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian (100%)
- 3. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
 - a. Capaian Program : Persentase konsistensi Dokumen RPJMD dengan Renstra OPD
 - b. Capaian Program : Persentase konsistensi Dokumen RPJMD dengan RKPD
 - c. Capaian Program : Persentase konsistensi Renstra OPD dengan Renja OPD
 - d. Capaian Program : Persentase konsistensi RKPD dengan Renja OPD
 - e. Capaian Program : Persentase konsistensi RKPD dengan KUA-PPAS
 - f. Capaian Program : Persentase konsistensi KUA- PPAS dengan RAPBD
 - g. Capaian Program : Persentase konsistensi RAPBD dengan APBD
 - h. Capaian Program : Persentase masukan masyarakat yang sudah diverifikasi yang diakomodir dalam RKPD
 - i. Capaian Program : Persentase realisasi target RPJMD Tahunan
 - j. Capaian Program : Presentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Dengan RTRW
- 4. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
 - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi (%)
- 5. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan Kemasyarakatan
 - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Sosial Dan Pemerintahan Kemasyarakatan (%)
- 6. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
 - a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah (%)

7. Program Penelitian Dan Pengembangan

- a. Capaian Program : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
- b. Capaian Program : Persentase inovasi yang diadopsi

kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
2. Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah
4. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Indagkop, Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata
5. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan
6. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Penganggaran Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender
9. Perencanaan dan Penganggaran SDM, Budaya dan Keagamaan
10. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan
11. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya
13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
14. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan
15. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
16. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
18. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
19. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
20. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
21. Peningkatan Kapasitas Aparatur
22. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
23. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan dana indikatif adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten
Tahun 2019**

Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
Program	Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3003.01		PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN				14.926.750.000	APBD		15.673.087.500
	001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Serang	22 Dokumen	95.000.000	APBD	22 Dokumen	99.750.000
	002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Serang	16 Dokumen	268.500.000	APBD	16 Dokumen	281.925.000
	003	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	Serang	1 Paket	1.750.000.000	APBD	1 Paket	1.837.500.000
	004	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Serang	12 Bulan	2.250.000.000	APBD	12 Bulan	2.362.500.000
	005	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		Serang	12 Bulan	6.435.000.000	APBD	12 Bulan	6.756.750.000
	006	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Serang	93 Orang	440.000.000	APBD	93 Orang	462.000.000
	007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Serang	12 Bulan	3.650.000.000	APBD	12 Bulan	3.832.500.000
	008	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Serang	12 Bulan	38.250.000	APBD	12 Bulan	40.162.500
3003.15		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN				5.670.000.000	APBD		5.953.500.000

	010	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan	Provinsi Banten	13 Dokumen	3.620.000.000	APBD	13 Dokumen	3.801.000.000
	011	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		Provinsi Banten	20 Dokumen	1.700.000.000	APBD	20 Dokumen	1.785.000.000
	012	Kerjasama Pendanaan Pembangunan		Provinsi Banten	3 Dokumen	350.000.000	APBD	3 Dokumen	367.500.000
3003.16		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI				2.675.000.000	APBD		2.808.750.000
	001	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan		Provinsi Banten	6 Dokumen	900.000.000	APBD	6 Dokumen	945.000.000
	002	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan		Provinsi Banten	10 Dokumen	875.000.000	APBD	10 Dokumen	918.750.000
	003	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif		Provinsi Banten	6 Dokumen	900.000.000	APBD	6 Dokumen	945.000.000
3003.17		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN				3.650.000.000	APBD		3.832.500.000
	001	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial		Kabupaten/Kota se	6 Dokumen	900.000.000	APBD	6 Dokumen	945.000.000
	002	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan		Kabupaten/Kota se	6 Dokumen	900.000.000	APBD	6 Dokumen	945.000.000
	003	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan		Kabupaten/Kota se	8 Dokumen	900.000.000	APBD	8 Dokumen	945.000.000
	004	Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah		Kabupaten/Kota se	12 Dokumen	950.000.000	APBD	12 Dokumen	997.500.000
3003.18		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH				2.400.000.000	APBD		2.520.000.000
	001	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral	Provinsi Banten	6 Dokumen	800.000.000	APBD	6 Dokumen	840.000.000

	002	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah		Provinsi Banten	6 Dokumen	900.000.000	APBD	6 Dokumen	945.000.000
	003	Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika		Provinsi Banten	6 Dokumen	700.000.000	APBD	6 Dokumen	735.000.000
1214.01		PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH				800.000.000	APBD		840.000.000
	001	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan		Serang	4 Dokumen	800.000.000	APBD	4 Dokumen	840.000.000
3007.15		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.240.000.000	APBD		5.502.000.000
	001	Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah		Provinsi Banten	14 Dokumen	4.090.000.000	APBD	14 Dokumen	4.294.500.000
	002	Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah		Provinsi Banten	4 Dokumen	1.150.000.000	APBD	4 Dokumen	1.207.500.000
Jumlah						35.361.750.000			37.129.837.500

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 (Renja) ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Bappeda Provinsi Banten untuk tahun anggaran 2019 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Banten Tahun 2017-2022. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BAPPEDA Provinsi Banten pada Tahun 2019, Renja Bappeda Provinsi Banten ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Bappeda Provinsi Banten.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan Visi Provinsi Banten “**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKU KARIMAH**”, maka sinkronisasi program/kegiatan di dalam Renja ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan sertakomitmen dari pimpinan dan staf Bappeda Provinsi Banten merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renja Bappeda Provinsi Banten Tahun 2019 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam RPJMD Provinsi Banten 2017-2022.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, Juni 2018

KEPALA BAPPEDA PROVINSI BANTEN,

H U D A Y A

Pembina Utama Madya
NIP. 19580612 198503 1 017